

## **Analisis Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003-2008**

*Analysis of Unemployment and Poverty Rates in Central Kalimantan Province 2003-2008*

**Ana Mustika**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series tahun 2001-2018. Pengumpulan data menggunakan metode library research. Analisis data dengan menggunakan model Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, Namun berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Regional. Begitu juga dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung berpengaruh negatif terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci : Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Anggaran Pendapatan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional**

### *ABSTRACT*

*This study aims to analyze: Unemployment and poverty rates affect the Regional Revenue and Expenditure Budget, Economic Growth and Regional Minimum Wages in Central Kalimantan Province. This research is a quantitative descriptive research. The data used is secondary time series data for 2001-2018. Collecting data using library research method. Data analysis using Multiple Linear Regression model. The results of the study indicate that the unemployment rate in Central Kalimantan Province has a direct negative and significant effect on the Regional Revenue and Expenditure Budget and Economic Growth, but has a positive effect on the Regional Minimum Wage. Likewise, the Poverty Level in Central Kalimantan Province directly has a negative effect on the Regional Revenue and Expenditure Budget, Economic Growth and Regional Minimum Wages in Central Kalimantan Province.*

**Keywords: Unemployment, Poverty Level, Regional Revenue Budget, Economic Growth and Regional Minimum Wage**

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan kesenjangan pendapatan (T odaro, 2000).

Salah satu instrumen dari kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan pengaturan distribusi dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Menurut Tang (2015), semakin besar sumber daya birokrasi negara, yaitu keadaan keuangan suatu negara akan semakin besar perluasan pengeluaran publik untuk program kesejahteraan sosial. Hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat.

Peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Kusreni dan Suhab, 2009). Kebijaksanaan tersebut tercermin dalam tiga kebijaksanaan pokok yaitu, kebijaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya

pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) mencakup pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pendapatan daerah yang sah lainnya mencakup dana hibah dan dana otonomi khusus.

Menurut Sukirno (2002: 151), jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 1) aparatur daerah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan rodapemerintah sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macamsubsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah,serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya

sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap. 2) pelayanan Publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah antara lain dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Menurut Sukirno, (1994) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah dalam upaya pembangunan tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penting untuk pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan pembangunan

untuk periode yang akan datang. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi. (Sukirno, 1994).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 3 kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mampu mengurangi munculnya kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru hanya memicu munculnya kesenjangan pendapatan dan in-equality. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap upaya menaikkan pendapatan penduduk miskin serta pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Perubahan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan dan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) maka semakin besar tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Kalimantan Tengah ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Efeknya akan memunculkan kemiskinan Struktural dimana pertumbuhan

ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar masyarakat yang tetap miskin. Pengurangan kemiskinan di suatu negara dan di waktu tertentu ditentukan secara penuh oleh tingkat penumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. Hubungan ini sesuai dengan teori “*trickle down effect*” dimana bila ekonomi tumbuh, maka secara otomatis akan terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan atau perembesan ke bawah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Dengan demikian kaum miskin dapat keluar dari kemiskinannya.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan sistem ekonomi terbuka sama sekali bukan jaminan bahwa kesenjangan kaya miskin di Indonesia akan berkurang banyak. Kalimantan Tengah saja, sebagai salah satu Provinsi dengan Pertumbuhan ekonomi terbesar, mengalami problem dalam kesenjangan. Sayidiman Suryohadiprojo (2011), mereka mengatakan bahwa kesenjangan yang lebar mengakibatkan berbagai kelemahan masyarakat, seperti Pendidikan yang rendah, kriminalitas tinggi, penggunaan narkoba meningkat, bahkan tingkat tinggi dalam penyakit jantung dan kanker.

Kesenjangan yang lebar tak hanya berakibat pada ekonomi, tetapi juga amat besar dampaknya terhadap kondisi psikologi bangsa. Maka boleh dikatakan bahwa “kesenjangan adalah kerawanan yang besar”. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial (Sukmana, 2005). Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada

sehingga lapangan pekerjaan merupakan concern dari pembuat kebijakan. Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur (Okun’s Law, 2006).

Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin (M. Alhudori, 2017).

Salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan pendapatan atau daya beli seseorang adalah kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum dibuat dengan tujuan melindungi para buruh agar upah yang diterima tetap sesuai dengan kebutuhan hidup minimum para buruh tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

Teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, mengatakan bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.

Teori klasik juga menjelaskan bahwa cara mengatasi pengangguran adalah dengan mengurangi tingkat upah. Teori klasik menganggap bahwa jika upah turun maka permintaan pasar akan tenaga kerja akan meningkat.

Pada Tabel 1.2 Upah Minimum Regional (UMR) mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 sebesar 778.997 Rupiah mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 765.868 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 986.590 dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2016 sebesar 2.057.558 Rupiah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Hubungan APBD Terhadap Pengangguran

Menurut Sukirno (2002: 151), jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Aparatur daerah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan rodapemerintah sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macamsubsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah,serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menjangtercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi

tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pelayanan Publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

### Hubungan APBD Terhadap Kemiskinan

Pendapatan asli daerah berasal dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi wilayah asli daerah tersebut. Adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan. Jika terdapat penurunan PAD maka jumlah kemiskinan akan bertambah. Besarnya nilai PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk membangun industri kreatif dan menggali potensi daerah yang bertujuan untuk menciptakan perusahaan-perusahaan daerah yang lebih produktif. Peningkatan industri kreatif yang tercipta melalui pengelolaan PAD dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Peningkatan industri kreatif pastinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Semakin banyaknya kebutuhan tenaga kerja tentunya

akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur. Adanya berbagai industri kreatif yang dibangun lewat PAD ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat mampu memenuhi berbagai kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya.

Perlu diketahui bahwa belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai merupakan bagian dari belanja yang mendukung kegiatan pembangunan salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan walaupun berdasarkan analisis model yang diperoleh terdapat juga belanja yang memberikan pengaruh yang signifikan namun tidak sesuai dengan harapan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Penurunan jumlah kemiskinan merupakan salah satu program nasional yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dana untuk program tersebut tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran**

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang kita kenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur.

Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif

penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan concern dari pembuat kebijakan. Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi (Okun's Law: 2006)

### **Hubungan Upah Minimum Regional terhadap pengangguran**

Upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Upah yang tinggi kemudian mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. “Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya” Mankiw (2000:122). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Oleh karena itu, “semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi” Kaufman

dan Hotchkiss (1999:233). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Menurut Sukirno (2000:122), garis lengkung menunjukkan yang lebih dikenal dengan sebutan Kurva Philips (Philips Curve), antara tingkat inflasi dan tingkat upah pekerja yang dibuktikan dengan kenaikan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah (pada saat upah rendah). Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi. Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran (tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena harus ada trade off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsekwensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

### **Hubungan Upah Minimum Regional dengan Kemiskinan**

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga

kesejahteraan juga meningkat dan sehingga tebebas dari kemiskinan (Kaufman 2000). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

### **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran di Kalimantan Tengah.
2. Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang mana data yang diperoleh dari seluruh populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

### **Tempat Penelitian**

Secara administratif lokasi penelitian berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alasan pilihan tempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan adanya keterbukaan dari Pihak Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga memudahkan di dalam pengumpulan data yang diperlukan yang

berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

2. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau, sehingga memudahkan transportasi dan menghemat waktu, biaya, pikiran maupun tenaga yang harus dikeluarkan.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (Kuncoro, 2003:124) dan merupakan data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002: 147). Data Tersebut berupa persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik yaitu [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data langsung kepada Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan seperti data APBD, pertumbuhan ekonomi, data Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran Terbuka, data persentase penduduk miskin, yaitu studi kepustakaan yaitu mencari, mempelajari serta memahami buku-buku Dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Mengetahui besarnya pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum model yang digunakan adalah regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan (K)} = \beta_0 + \beta_1\text{APBD} + \beta_2\text{PE} + \beta_3\text{UMR} + \mu \dots (1)$$

$$\text{Pengangguran (TPT)} = \beta_0 + \beta_1\text{APBD} + \beta_2\text{PE} + \beta_3\text{UMR} + \mu \dots (2)$$

Model yang terdapat pada persamaan (1) dan (2) ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan semi Ln, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{K} = \beta_0 + \beta_1\text{LnAPBD} + \beta_2\text{PE} + \beta_3\text{LnUMR} + \mu \dots (3)$$

$$\text{TPT} = \beta_0 + \beta_1\text{LnAPBD} + \beta_2\text{PE} + \beta_3\text{LnUMR} + \mu \dots (4)$$

Dimana :

K = Kemiskinan dalam persen (%)

TPT = Tingkat Penganggura Terbuka dalam persen (%)

LnAPBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam miliar rupiah

PE = Pertumbuhan Ekonomi (PE) dalam persen (%)

LnUMR = Upah Minimum Regional (UMR) dalam satuan Miliar rupiah

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien penjelas masing-masing input nilai parameter

$\mu$  = Standar Error

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda Dalam Bentuk Semi-Logaritma pada Variabel Pengangguran (Y1)**

Variabel	Coefficient	Std. Error	T	Sig
Constants	41,970	3,431	12,233	0,000
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (X1)	-0,711	0,208		0,001
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	-1,453	0,269	-5,400	0,000
Upah Minimum	0,712	0,270	2,640	0,001

Variabel	Coefficient	Std. Error	T	Sig
Regional (X3)				
F		42,686		
Durbin Watson		0,377		
N		64		

Hasil dari tabel di atas dapat disusun kembali persamaan regresi linear berganda dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut:  
 **$\text{Ln} = 41,970 - 0,711\text{APBD} - 1,453\text{PE} + 0,712\text{UMR}$**

Untuk memperjelas persamaan hasil Analisis Regresi Linear Berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 41,970 ini berarti bahwa saat X1, X2 dan X3 sama maka nilai Pengangguran anti Log= 41,970
2. Nilai koefisien regresi APBD (X1) sebesar -0,711 signifikan pada  $\alpha=5\%$ , ini berarti bahwa apabila APBD naik sebesar 1% maka dapat menurunkan peangguran di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -0,711%.
3. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X2) sebesar -1,453 signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Ini berarti bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1% maka dapat menurunkan peangguran di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -1,453%.
4. Nilai koefisien regresi Upah Minimum Regional (X3) sebesar 0,712 signifikan pada  $\alpha=5\%$ , ini berarti bahwa apabila Upah Minimum Regional naik sebesar 1% maka dapat meningkatkan peangguran di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,712%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap tingkat peangguran. Terlihat dari jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode. Periode tersebut tergantung dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah penerimaan, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan

pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan. Pelayanan Publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fsiik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selaludisesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat peangguran.

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat peangguran. Itu sebabnya mengapa pertumbuhan ekonomi dan peangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan peangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan peangguran, sehingga semakin tinggi tingkat peangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Upah Minimum Regional Provinsi Kalimantan Tengah berpengaruh sepenuhnya terhadap tingkat peangguran di Kalimantan Tengah. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat peangguran yang ada.

Dalam setiap kenaikan UMR (Upah Minimum Regional) tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu pengaruhnya adalah inflasi. Meskipun dirasa kenaikan UMR ini tidak berpengaruh akan tetapi kenaikan ini juga membantu dan berpotensi meningkatkan masalah inflasi

disuatu wilayah/negara. Karena dengan banyak uang yang dikeluarkan untuk penambahan gaji yang diberikan kepada para pekerja, itu tentunya juga akan menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.

Pasti dengan gaji yang tinggi secara tidak langsung orang juga akan meningkat jumlah konsumsi mereka. Kalau jumlah konsumsi naik maka produsen akan menambah/meningkatkan jumlah produksi. Setelah produksi naik dengan tingkat konsumsi yang tinggi maka produsen/penjual juga secara tidak langsung menaikkan harga barang tersebut. Karena dengan tingkat konsumsi yang tinggi menyebabkan harga-harga barang yang lain juga akan naik.

Selanjutnya pengaruh kenaikan UMR yaitu mengurangi pendapatan di wilayah tersebut, karena dengan tingkat UMR yang tinggi wilayah tersebut otomatis juga harus menambah jumlah anggaran belanja negara untuk pekerja atau pegawai yang bekerja pada sektor formal, seperti pendidikan yaitu gaji seorang PNS, guru dll.

Kemudian pengaruh kenaikan UMR yang selanjutnya yaitu perusahaan terancam bangkrut. Tidak semua perusahaan yang ada di wilayah tersebut ini perusahaan yang besar, maka untuk perusahaan yang bersifat kelas menengah kebawah kalau UMR dinaikkan tentunya perusahaan juga akan menaikkan gaji para pekerjanya. Kalau gaji pekerja naik maka pengeluaran perusahaan untuk gaji pekerja juga akan meningkat.

Maka hal itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan kelas menengah kebawah. Karena dengan pengeluaran yang tinggi kas perusahaan berkurang dan berpotensi terancam bangkrut. Kalau perusahaan gulung tikar maka pekerja juga akan menganggur karena tidak memiliki pekerjaan. Sehingga akan menambah tingkat pengangguran.

### **Hasil Analisis Regresi Linear Pada Variabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan**

Peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Kusreni dan Suhab, 2009). Kebijakan tersebut tercermin dalam tiga kebijaksanaan pokok yaitu, kebijaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk mengamati seberapa besar ketiga kebijaksanaan APBD tersebut dalam berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003-2018.

Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2011).

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga tebebas dari kemiskinan (Kaufman 2000). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :

Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda Dalam Bentuk Semi-Logaritma pada Variabel Kemiskinan (Y2)**

Variabel	Coefficient	Std. Error	T	Sig
Constants	26,102	1,345	19,404	0,000
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (X1)	-0,200	0,081	-2,453	0,017
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	-0,257	0,105	-2,440	0,018
Upah Minimum Regional (X3)	-0,203	0,106	-1,919	0,060
F	295,099			
Durbin Watson	0,129			
N	64			

Hasil dari tabel di atas dapat disusun kembali persamaan regresi linear berganda dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut:  

$$\ln = 26,102 - 0,200APBD - 0,257PE - 0,203UMR$$

1. Nilai Konstanta sebesar 26,102 ini berarti bahwa saat X1, X2 dan X3 sama maka nilai Kemiskinan anti Log= 26,102
2. Nilai koefisien regresi APBD (X1) sebesar -0,200 signifikan pada  $\alpha=5\%$ , ini berarti bahwa apabila APBD naik sebesar 1% maka dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -0,200%.
3. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X2) sebesar -0,257 signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Ini berarti bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1%

maka dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -0,257%.

4. Nilai koefisien regresi Upah Minimum Regional (X3) sebesar -0,203 secara parsial tidak signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Ini berarti bahwa pada tingkat keyakinan 95% upah minimum regional tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, namun demikian dilihat dari uji secara simultan signifikan pada  $\alpha=5\%$  dimana F hitung lebih besar dari F tabel, makasacara bersama-sama variabel lain dengan variabel upah minimum regional mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan.

### Hasil Uji Statistik Uji Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk menetapkan signifikansi pengaruh setiap variabel independen (secara parsial atau satu-satu) terhadap variabel dependen dengan kriteria berikut:

1.  $H_a$  diterima jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  dengan taraf signifikansi sebesar 0,05
2.  $H_a$  ditolak jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$  dengan taraf signifikansi sebesar 0,05

**Tabel 3. Hasil Uji t pada Variabel Tingkat Pengangguran (Y1)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41,970	3,431		12,233	,000
	LN_APB	-0,711	0,208	-1,608	-3,422	0,001
	LN_PE	-1,453	0,269	-0,488	-5,400	0,000
	LN_UMR	0,712	0,270	1,222	2,640	0,011

Dependent Variabel: Tingkat Pengangguran

Adapun hipotesis penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Tingkat

Pengangguran sesuai hasil regresi linear berganda dalam tabel di atas maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-3,422 < 1,670$  dengan signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Artinya adalah  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran sesuai hasil regresi linear berganda dalam tabel di atas maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-5,400 < 1,670$  dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya adalah  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima yaitu Perumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.
3. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran sesuai hasil regresi linear berganda dalam tabel di atas maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,640 > 1,670$  dengan signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$ . Artinya adalah  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak yaitu Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.

$1,670$  dengan signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$ . Artinya adalah  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran sesuai hasil regresi linear berganda dalam tabel di atas maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,440 < 1,670$  dengan signifikansi sebesar  $0,018 < 0,05$ . Artinya adalah  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima yaitu Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
3. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran sesuai hasil regresi linear berganda dalam tabel di bawah maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,919 < 1,670$  dengan signifikansi sebesar  $0,060 > 0,05$ . Artinya adalah  $H_3$  ditolak dan  $H_0$  diterima yaitu Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

**Tabel 4. Hasil Uji t pada Variabel Tingkat Kemiskinan (Y2)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	26,102	1,345		19,404	,000
	LN_APBDD	-0,200	,081	-,514	-2,453	,017
	LN_PE	-0,257	,105	-,098	-2,440	,018
	LN_UMR	-0,203	,106	-,396	-1,919	,060

Adapun hipotesis penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan sesuai hasil regresi linear berganda dalam tabel di atas maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,453 <$

**Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu (t) dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Uji Autokorelasi (Y1)**

Durbin Watson
0,377

Nilai Durbin Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan DW hitung. Angka ini dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang

akan dibuat dengan nilai  $d_1$  dan  $d_u$ . Ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi ( $k$ ) dan jumlah sampelnya ( $n$ ). Nilai  $d_1$  dan  $d_u$  dapat dilihat pada tabel DW dengan tingkat signifikan (*error*) 5% ( $\alpha = 5\%$ ). Jumlah variabel bebas = 3 dan jumlah sampel :  $n = 16$  kemudian di interpolasikan dalam kuartel menjadi  $n = 64$ .

### **Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran**

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kepercayaan 0,001 signifikan 5%. Nilai koefisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar -0,711 yang berarti bahwa apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat 1% maka tingkat pengangguran akan turun sebesar -0,711%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) signifikan terhadap tingkat pengangguran.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peningkatan industri kreatif yang tercipta melalui pengelolaan PAD dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Peningkatan industri kreatif pastinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Semakin banyaknya kebutuhan

tenaga kerja tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran**

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kepercayaan 0,000 signifikan 5%. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -1,453 yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka tingkat pengangguran akan turun sebesar -1,453%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa Pertumbuhan Ekonomi signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan concern dari pembuat kebijakan. Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi (Okun's Law: 2006)

### **Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Tingkat Pengangguran**

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, variabel Upah Minimum Regional secara statistik berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kepercayaan 0,011 signifikan 5%. Nilai koefisien Upah Minimum Regional sebesar 0,712 yang berarti bahwa apabila Upah Minimum Regional meningkat 1% maka tingkat pengangguran akan naik sebesar 0,712%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa Upah Minimum Regional signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Upah yang tinggi kemudian mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. “Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya” Mankiw (2000:122). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Oleh karena itu, “semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi” Kaufman dan Hotchkiss (1999:233). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

### **Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kepercayaan 0,017 signifikan 5%. Nilai koefisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar -0,200 yang berarti bahwa apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar -0.200%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pendapatan asli daerah berasal dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi wilayah asli daerah tersebut. Adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan. Jika terdapat penurunan PAD maka jumlah kemiskinan akan bertambah. Besarnya nilai PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk membangun industri kreatif dan menggali potensi daerah yang bertujuan untuk menciptakan perusahaan-perusahaan daerah yang lebih produktif.

Adanya berbagai industri kreatif yang dibangun lewat PAD ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat mampu memenuhi berbagai kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi

secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kepercayaan 0,018 signifikan 5%. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,257 yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar -0,257%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa Pertumbuhan Ekonomi signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Menurut Siregar (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin.

#### **Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, variabel Upah Minimum Regional secara statistik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kepercayaan 0,060 signifikan 5%. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,203 yang berarti bahwa apabila Upah Minimum Regional meningkat 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar -0,203%. Hal tersebut tidak sesuai dengan

hipotesis bahwa Upah Minimum Regional signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat disusun dari hasil dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Pengangguran
3. Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan
5. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan
6. Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan

### **Saran**

Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu kebijakan yang tepat khususnya kebijakan mengenai ekonomi makro,

sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah bisa berkurang. Maka dari itu pemerintah beserta lembaga-lembaga negara lainnya harus bisa membuat kebijakan yang tepat sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat nganggur dan miskin, untuk itu ada beberapa saran yaitu:

1. Dalam rangka mengentaskan pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah perlu memperhatikan APBD. Pemerintah perlu mengurangi pengangguran melalui kebijakan dengan mengembangkan atau meningkatkan belanja pemerintah yang menciptakan pekerjaan baru. Misalnya pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan lain-lain.
2. Untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah maka juga perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memperhatikan efektifitas penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan concern dari pembuat pekerjaan sehingga tingkat pengangguran akan semakin menurun dengan meningkatnya lapangan pekerjaan.
3. Dengan naiknya permintaan Upah Minimum Regional, maka tingkat pengangguran juga akan ikut naik. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut efisiensi untuk mengurangi jumlah pekerja diperusahaan tersebut. Dengan hal ini, peneliti menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan keteapan standar batas upah untuk kelas bawah. Agar pekerja merasa jasa yang pekerja keluarkan sesuaikan dengan upah yang mereka terima.
4. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah perlu memperhatikan APBD. Pemerintah harus mengatur secara hati-hati masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika keuangan daerah dan anggaran daerah dapat terealisasi dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah tersebut. Apabila perekonomian daerah baik, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah.
5. Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pendapatan perkapita masyarakat juga bertambah sehingga akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.
6. Untuk mengentaskan kemiskinan selanjutnya dilihat dari Upah Minimum Regional (UMR), UMR yang meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak agar mampu meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang. Kebijakan Upah Minimum Regional harus dilakukan karena merupakan kebijakan yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Perlu pengawasan yang lebih ketat dalam penetapan upah minimum dan perlu diterapkan standar minimum sebagai produktifitas para pekerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adit Agus Prasetyo (2010) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat

- Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- Arsyad, Lincolin. (1999) Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, (2010) “ekonomi Pembangunan” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Granfind O
- Atalay, R (2015). Science direct the education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the economic development. *Procedia – soxial and behavioral sciences*, 174. Pp. 969-967
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah (2018). Kalimantan Tengah d\Dalam Angka. BPS Kalimantan Tengah: Kalimantan Tengah.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah (2018). Statistik Daerah. BPS Kalimantan Tengah: Kalimantan Tengah.
- Boediono (1992). “Teori Pertumbuhan Ekonomi”. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi no. 4. Yogyakarta : BPEE.
- Boediono. (1985). “Teori Pertumbuhan Ekonomi”. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Djojohadikusomo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Diana Wijayanti dan Wahono (2005). Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003.
- Dyah, Arini Rudiningtyas (2009). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan tahun 2004-2008. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA).
- Farid, Alghofari (2010). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jhingan, M.L. (2010). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terjemahan Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Lestari Sukarmiati (2008). Pengaruh sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- M. Alhudori (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi, *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* Vol. 1 No.1 September (2017).
- Michael P.Todaro, Stephen C.Smith (2012). *Economic Development (person Series in Economics)*.
- Nasir M.Muh. Saichudin dan Maulizar (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di kabupaten Purwerjo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No.4, Agustus 2008. Jakarta.
- Okun’s Law. (2006). Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Laporan Perkembangan Ekonomi dan perbankan Kep. Bangka Belitung Triwulan II (2006).
- Renta Yustie (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya.
- Sadono Sukirno, (2006). Pengantar Ekonomi Makro, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sadono, Sukirno (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sitepu dan Sinaga (2005). Dampak investasi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.
- Sri Kuncoro (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat

- Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Todaro, Michael P. (1994). *Ekonomi untuk negara berkembang*. Edisi ketiga, Jakarta: BUMI AKSARA.
- Todaro, Michael P. (2000) *pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. Dan S. C Smith (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jilid 1. Edisi kedelapan. Jakarta, Erlangga.
- Utami (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kebijakan penanggulangannya di Provinsi Jawa Timur*.
- Whisnu Adhi Saputra (2011). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*.
- Yacoub Y. (2012) *pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan Barat*. Jurusan ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, 8(3). PP.176-185.